

BAB I

PENDAHULUAN

1.2 Latar Belakang

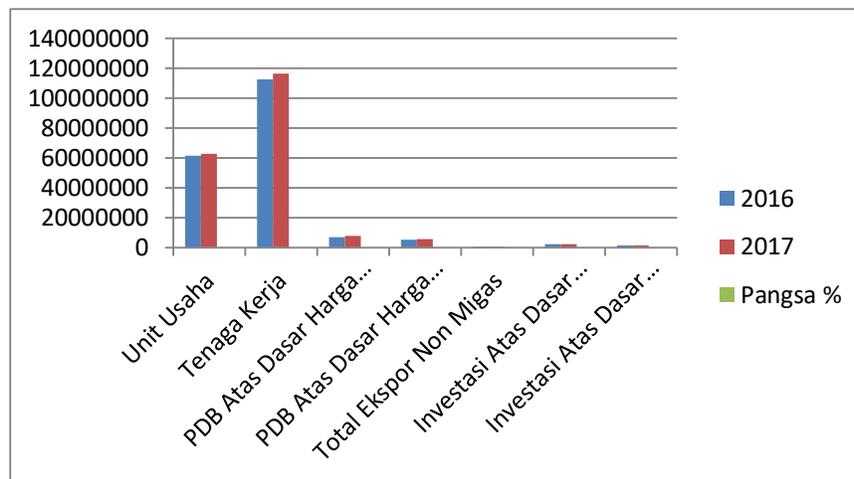
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dimana dalam perekonomian Indonesia UMKM merupakan kelompok usahadengan jumlah yang paling besar yang menjadi salah satu bagian penting dalam meningkatkanpendapatan suatu daerah ataupun Negara. Peran penting tersebut telah mendorong berbagai Negara untuk meningkatkan dan mengembangkan UMKM begitupun dengan Indonesia. UMKM menjadi tumpuan untuk menghasilkan nilai tambah, penciptaan lapangan kerja, dan sumber devisa bagi suatu Negara. Tidak heran jika UMKM menjadi sektor yang eksotis dan menjadi bagian penting dalam kemajuan suatu negara, karena Negara yang berhasil menjadi Negara maju memiliki keberhasilan pula dalam memajukan sektor usaha kecil dan menengah (Riana, 2015).

Pemberdayaan UMKM oleh pemerintah dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Pasal 7 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.” Hal tersebut dapat berarti pemerintah memiliki peran penting pemberdayaan dan memajukan UMKM(Undang-Undang RI No.20, 2008).

UMKM menjadi salah satu sektor ekonomi nasional yang paling strategis dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga dapat dikatakan saat ini UMKMmenjadi tulang punggung perekonomian nasional. Pengembangan UMKM sangatlah penting untuk dilakukan mengingat perannya yang sangat strategis.

Pembenaran paling mendasar untuk mengembangkan UMKM adalah 99,99% dari seluruh jumlah unit usaha dan UMKM memiliki daya serap tenaga yang besar. Selain itu kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga cukup besar (Dina Amalia, 2017).

Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia Tahun 2016-2017 :



Sumber : Kementrian Koperasi dan UKM dan BPS(diolah).

Gambar 1.1 Perkembangan Data UMKM di Indonesia 2016-2017

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa, secara progresif selama dua tahun terakhir perkembangan unit usaha UMKM di Indonesia mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 2,06 persen, untuk tenaga kerja walaupun mengalami penurunan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,41 persen, untuk kontribusi pada pembentukan Produk Domestik Bruto dengan harga berlaku menunjukkan 9,92 persen, sedangkan dengan harga konstan 4,92 persen. Untuk nilai ekspor non migas mengalami penurunan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 16,89 persen. Sementara pada nilai investasi dengan harga berlaku tampak mengalami penurunan dengan rata-rata 8,69 persen, sedangkan dengan harga konstan mengalami peningkatan nilai investasi sebesar 6,54 persen(BPS dan Kemenkop, 2017).

Data di atas juga menunjukkan bahwa apa yang menjadi harapan pemerintah terhadap program pemberdayaan yang dilakukan selama ini belum memberikan hasil

yang sesuai dengan yang diharapkan. Fenomena kinerja UMKM di Indonesiadari
Isna Nuraina Mutmainah, 2019
PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM (USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH)

perspektif pertumbuhan jumlah unit usaha, penyerapan tenaga kerja, kontribusinya pada pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), nilai ekspor, dan nilai investasi belum memberi hasil yang menggembirakan. Walaupun pertumbuhannya menunjukkan kenaikan, tetapi pangasanya kecil. Hal ini mengindikasikan, bahwa untuk seluruh indikator makro, kinerja UMKM belum menunjukkan pertumbuhan kuantitas dan kualitas yang optimal. Pertanyaannya mengapa kondisi UMKM Indonesia belum optimal atau belum menunjukkan perkembangan yang berarti karena ada permasalahan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius yang harus dikaji secara ilmiah tentang keberadaan UMKM Indonesia.

Secara umum UMKM sering mengalami beberapa jenis kendala atau permasalahan yang sering dikeluhkan. UMKM yang masih rendah serta minimnya pengetahuan dan kompetensi kewirausahaan yang mengakibatkan rendahnya produktivitas usaha, tenaga kerjadan berbagai masalah yang lain yang berkaitan dengan pengelolaan usaha, sehingga UMKM sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar (Abor & Quartey, 2010). Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu terdapat faktor yang mempengaruhi kinerja UMKM baik faktor internal maupun eksternal. Keberhasilan tergantung dari kemampuan dalam mengelola kedua faktor ini melalui analisis faktor lingkungan serta pembentukan dan pelaksanaan strategi usaha dengan melalui penerapan yang tepat. Menurut (Haeruman, 2000)(Abidin, 2004)tantangan internal bagi UMKM terutama dalam pengembangannya mencakup aspek yang luas yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemampuan manajemen, organisasi dan teknologi, kompetensi kewirausahaan, pembiayaan, pengelolaan dan perencanaan keuangan. Sedangkan dalam faktor eksternal meliputi jaringan sosial, legalitas, dukungan pemerintah, pembinaan, kemampuan pemasaran dan akses kepada informasi(Jauch & Glueck, 2000).

UMKM saat ini memiliki potensi bisnis yang sangat besar dan pemerintah berusaha untuk terus meningkatkan potensi tersebut melalui program-program yang terus digalakkan, karena semakin banyak masyarakat berwirausaha maka semakin baik dan kokohnya perekonomian suatu daerah karena sumber daya lokal, pekerja lokal, dan pembiayaan lokal dapat terserap dan bermanfaat secara optimal (Sudiarta, Isna Nuraina Mutmainah, 2019

PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH)

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2014). Meskipun UMKM memiliki sejumlah kelebihan yang memungkinkan UMKM dapat berkembang dan bertahan dalam krisis ekonomi, akan tetapi sejumlah fakta juga menunjukkan bahwa tidak semua usaha kecil dapat bertahan mengalami krisis ekonomi. Banyak UMKM yang mengalami kesulitan untuk mengembalikan pinjaman akibat melonjaknya suku bunga, selain itu adanya kesulitan dalam proses produksi akibat melonjaknya harga bahan baku yang berasal dari impor.

Pemberdayaan UMKM perlu ditingkatkan oleh Pemerintah mengingat setiap tahun target pertumbuhan ekonomi semakin tinggi tetapi tidak diikuti dengan peningkatan kualitas UMKM. Pertumbuhan UMKM di arus globalisasi dan tingginya persaingan membuat UMKM harus menghadapi tantangan global seperti meningkatkan inovasi produk dan jasa, pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta perluasan area pemasaran. Pasar ekonomi Indonesia mempunyai potensi berkembang dengan pesat karena jumlah populasi yang akan tetap tumbuh sehingga kebutuhan akan permintaan dan penawaran pun akan tinggi. Hal ini seharusnya dimanfaatkan para pelaku UMKM untuk menambah nilai jual UMKM itu sendiri, utamanya agar dapat bersaing dengan produk-produk asing yang kian membanjiri pasar lokal. Melihat banyaknya tantangan di masa depan membuat para pelaku UMKM semaksimal mungkin mengembangkan usahanya.

Hal ini terlihat nyata pada ketidakmampuan dalam hal manajemen usahaterutama dalam hal tata tertib pencatatan pembukuan, UMKM yang belum memiliki badan hukum yang jelas dan sebagian UMKM juga kurang memiliki pengetahuan tentang aspek legalitas dan perizinan. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut UMKM memerlukan biaya yang relatif besar, apalagi jika dikelola secara mandiri yang mengakibatkan UMKM kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usahanya atau mengembangkan produk-produk yang mampu bersaing. Sebagian besar UMKM belum cukup tersentuh oleh pelayanan lembaga keuangan formal (bank), sehingga tidak sedikit dari UMKM terpaksa memanfaatkan jasa lembaga keuangan mikro yang tradisional, meskipun dengan beban dan risiko yang cukup memberatkan demi mempertahankan kelangsungan hidupnya (Sahabuddin, 2015).

Namunkontribusi UMKM yang besar secara agregat belum mencerminkan kinerja terbaik UMKM Indonesia dalam persaingan pasar domestik maupun pasar mancanegara. Hal ini disebabkan oleh berbagai persoalan yang dihadapi para pelaku UMKM di Indonesia. Sebagaimana laporan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) tahun 2012 menyebutkan bahwa pertama kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurism*) pelaku UMKM masih rendah dalam melakukan inovasi produk. Kedua, tingkat keahlian (*level of expertise*) masih belum memadai dalam menyelesaikan persoalan organisasi dan manajemen usaha sehingga tidak mampu melakukan aktivitas usaha secara efisien, efektif dan fleksibel. Ketiga, jejaring (*networking*) masih terbatas sehingga menghambat akses informasi, pasar dan input dibanding UMKM di negara lain. Keempat, keterhubungan (*linkage*) masih minim sehingga tidak dapat mengeksplorasi dengan baik pasarnasional maupun regional. Terakhir, akses keuangan (*access of financial*) kurang berpihak pada pelaku UMKM sehingga terkendala dalam pengembangan usaha ke skala yang lebih besar. Kelemahan ini tidak hanya menghambat pertumbuhan kinerja UMKM, tetapi juga melemahkan daya saing UMKM pada suatu provinsi (Donald Lantu, Ghazali, & Ami Fitri Utami, 2016).

Maka dari itu diperlukan upaya-upaya strategis guna meningkatkan kinerja UMKM. Salah satunya dengan cara memperkaya pengetahuan pelaku UMKM terhadap pengetahuan keuangan sehingga pengelolaan keuangan dan akuntabilitas usaha dapat berkembang dengan baik (Aribawa, 2016). Literasi keuangan menjadi isu yang sangat sering diperbincangkan pada beberapa tahun kebelakang ini di Indonesia. Isu yang muncul tidak terlepas dari berbagai pemberitaan yang terjadi, mulai dari Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sampai pada krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1998. Pada jaman sekarang ini literasi keuangan merupakan hal yang penting dan dianggap menjadi kebutuhan bagi masyarakat luas, sehingga masyarakat dituntut harus mengetahui dan paham akan literasi keuangan tersebut.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan literasi keuangan merupakan rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*), keterampilan masyarakat luas, sehingga mereka mampu mengelola

Isna Nuraina Mutmainah, 2019

PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH)

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

keuangan dengan lebih baik. Dari pengertian tersebut diharapkan konsumen produk dan jasa keuangan maupun masyarakat tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan. Namun literasi keuangan tidak terbatas pada pengertian pengetahuan, keterampilan dan keyakinan akan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan semata, namun sikap dan perilaku pun dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan yang selanjutnya dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sikap dan perilaku keuangan yang bijak tercermin dalam kemampuan seseorang menentukan tujuan keuangan, mengelola keuangan dan mampu mengambil keputusan keuangan yang berkualitas dalam menggunakan produk dan layanan jasa keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2013 menyatakan bahwa literasi keuangan merupakan rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan dan memberikan manfaat (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Menurut OJK, bahwa tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yakni:

1. *Well literate* (21,84 %), yakni memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, serta memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.
2. *Sufficient literate* (75,69 %), memiliki pengetahuan dan keyakinan tentang lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, termasuk fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan.
3. *Less literate* (2,06 %), hanya memiliki pengetahuan tentang lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan.

4. *Not literate* (0,41%), tidak memiliki pengetahuan dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, serta tidak memiliki keterampilan dalam menggunakan produk dan jasa keuangan.

Dalam prakteknya literasi keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan tingkat keberhasilan dan keberlangsungan perekonomian bagi masyarakat luas suatu negara demi meningkatkan kesejahteraan, terutama bagi pelaku usaha di Indonesia seperti UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah). Arjuna Wiwaha (2013) menyatakan bahwa UMKM merupakan salah satu penggerak sektor informal terbesar di Indonesia yang memiliki kontribusi yang cukup besar dalam sistem perekonomian. Hal ini sesuai dengan tujuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Dilansir dari ekonomi.kompas.com Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pelaku jasa keuangan untuk aktif memberi pemahaman literasi keuangan serta menyediakan produk layanan keuangan sesuai kebutuhan masyarakat karena dari sisi konsumen masih sedikit masyarakat yang memahami literasi keuangan. Hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan nasional di tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat 67,8 persen masyarakat yang telah menggunakan produk dan layanan keuangan. Namun demikian hanya 29,7 persen masyarakat yang mampu atau paham mengenai literasi keuangan. Hal tersebut berarti banyak masyarakat yang telah memiliki akses keuangan namun tidak dibekali pemahaman keuangan yang memadai. Peningkatan pemahaman mengenai literasi keuangan dapat meningkatkan kebiasaan masyarakat untuk menabung dan berinvestasi. Hal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penggunaan produk dan layanan keuangan oleh masyarakat akan menjadi salah satu sumber dana untuk pembangunan dan memperkuat ketahanan sistem keuangan di Indonesia (Aziza, 2017).

Selain literasi keuangan, berdasarkan penelitian terdahulu terdapat pula faktor penting yang dapat mempengaruhi kinerja usaha UMKM yaitu perencanaan keuangan (Sudiarta, 2014). Menurut *Certified Financial Planner, Financial Planning* Isna Nuraina Mutmainah, 2019

PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH)

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Standards Board Indonesia perencanaan keuangan merupakan proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terencana (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Dilansir dari *solusiukm.com* dalam mendirikan sebuah bisnis tahap awal yang harus dilakukan adalah perencanaan. Banyak sekali perencanaan yang harus dituliskan salah satunya yang paling penting adalah manajemen keuangan dalam perencanaan keuangan yang harus dijalankan. Masalah yang sering muncul pada UMKM karena pelaku usaha tidak bisa memegang uang yang cukup banyak. Uang menjadi sesuatu yang cukup penting, tanpa perencanaan yang baik dan benar maka bisa menyebabkan uang itu tidak jelas diperuntukannya sehingga harus direncanakan dengan baik, dalam mengelola keuangan harus bisa dilakukan perincian yang benar dan alokasi yang jelas terutama untuk UMKM, karena sangat jarang orang yang baru memulai usaha menggunakan modal yang dimilikinya digunakan dengan benar. Memang pada umumnya manajemen keuangan lebih sering digunakan oleh perusahaan besar. Akan tetapi bukan berarti pada usaha kecil, manajemen keuangan tidak diterapkan. Karena usaha kecil juga harus memberikan perhatian yang sesuai dengan pengelolaan dana tersebut. Perencanaan keuangan memang tidak bisa terlepas dari akuntansi, untuk itu sedikit pemahaman tentang akuntansi diperlukan oleh pengusaha kecil, agar usaha mereka tetap berjalan dan berkembang serta modal yang sudah dikeluarkan bisa kembali dalam waktu yang sudah ditetapkan. Perencanaan keuangan yang tidak sesuai dengan posisinya akan menyebabkan pelaku usaha mengalami kerugian dan kehabisan modal, untuk itu disinilah fungsi perencanaan keuangan pada UMKM yang sedang dijalankan (Iskandar Rumi, 2017).

Berdasarkan catatan OJK, kontribusi sektor UMKM di Indonesia terbukti sangat signifikan bagi perekonomian nasional dengan menyumbang 60 % Produk Domestik Bruto dan menyerap 97% dari tenaga kerja nasional. Pentingnya peranan sektor UMKM dalam mendukung pertumbuhan perekonomian tersebut mengharuskan dilakukannya penguatan kapasitas UMKM. Salah satu bentuk penguatan tersebut adalah dengan meningkatkan kemampuan UMKM dalam mengelola keuangan serta dalam perencanaan keuangan. Dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada sektor UMKM, perbankan dan perusahaan *Fintech* mampu

Isna Nuraina Mutmainah, 2019

PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH)

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

memberikan solusi bagi dunia usaha, memberikan nilai tambah bagi masyarakat, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan lapangan pekerjaan baru yang menjanjikan seperti memiliki toko untuk usaha, tentunya akan bermanfaat untuk meningkatkan akses pembiayaan mikro termasuk kepada sektor UMKM (Sanusi, 2018).

Masalah utama dan kongkrit yang dihadapi pelaku UMKM adalah dengan pengelolaan keuangan. Jika pengelolaan keuangan dalam usaha belum baik maka akan menjadi pemicu terjadinya permasalahan pada usahanya dan berakhir pada kegagalan. Begitupun dengan UMKM di kota Ciamis sebagai salah satu kota di Jawa Barat yang memiliki sentra industri kecil beragam, dengan padat karya sebagai industri kecil yang menonjol dan tersebar diberbagai daerah Ciamis, seringkali banyak yang mengabaikan manajemen keuangan dalam mengucurkan modal usaha yang akan digunakan serta tidak ada perencanaan yang baik dalam mengelola dana tersebut. Menurut Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya dalam fokusjabar.com menggelar *workshop* yang bertajuk “Membina UMKM yang sukses melalui edukasi keuangan” mengatakan bahwa saat ini banyak UMKM yang tidak memahami bagaimana membuat rencana keuangan dan *financial preneur* terhadap kinerja usahanya. Ketika mendapatkan uang yang cukup banyak, setelah itu pula pelaku usaha tidak bisa membagi keuntungan secara proposional untuk dikelola menjadi modal lagi dan keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha lebih sering digunakan untuk uang pribadi maka dari itu harus ada perencanaan keuangan pada pelaku UMKM (Kasim, 2017).

Selain itu masalah yang terjadi pada UMKM di kota Ciamis yaitu masih kalah bersaing dengan produk daerah lain dikarenakan masih rendahnya kreativitas SDM pelaku UMKM di Ciamis dalam mengembangkan usahanya termasuk dengan pengelolaan keuangan dan juga pemerintah kabupaten ciamis berharap bahwa UMKM di Ciamis bisa mengelola keuangannya dengan baik serta menstabilkan keuangan daerah sehingga bisa mengatasi kemiskinan. Upaya yang dilakukan ini untuk mewujudkan UMKM yang tangguh dan kuat dalam rangka pembangunan, ekonomi lokal dan pertumbuhan, serta untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, dapat dilakukan dengan cara menciptakan iklim yang kondusif bagi

Isna Nuraina Mutmainah, 2019

PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH)

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

UMKM, memperluas jaringan pemasaran dalam meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan akses permodalan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), mengembangkan inovasi dan kreatifitas usaha, mengikut sertakan UMKM dalam berbagai acara pameran dan mengadakan pelatihan kewirausahaan, teknologi produksi yang berwawasan lingkungan dan teknologi informasi (*koransindo.com*, 2016).

Isu-isu strategis yang dihadapi UMKM Ciamis menurut Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan (DISKOPERINDAG, 2017) antara lain:

1. Terbatasnya kualitas SDM pelaku UMKM.
2. Terbatasnya jaringan usaha, lemahnya mengakses sumber permodalan bagi pelaku UMKM.
3. Belum memadainya peralatan produksi dan kurangnya bahan baku dan sulit diperoleh.
4. Keterbatasan dana sehingga pembinaan yang dilakukan kurang maksimal.
5. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang cara mengelola keuangan pelaku UMKM dengan baik dan benar.
6. Tingginya fluktuasi harga dan ketersediaan barang di pasaran akibat adanya pengaruh ekstrim cuaca mempengaruhi terhadap kebutuhan pokok masyarakat khususnya di pasar-pasar tradisional.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Aribawa, 2016 melakukan penelitian mengenai Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja dan keberlanjutan usaha pada UMKM kreatif di Jawa Tengah. Dan juga didukung oleh penelitian Dahmen & Rodríguez, 2014 menyatakan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap kinerja secara keseluruhan pada perusahaan kecil, untuk itu sangat diperlukannya pemahaman tingkat literasi keuangan untuk kelangsungan usahanya.

Peneliti melakukan penelitian tentang tingkat literasi keuangandan menambahkan perencanaan keuangan sebagai variabel independen apakah
Isna Nuraina Mutmainah, 2019
PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH)
 Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

berpengaruh terhadap kinerja UMKM. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu peneliti menambahkan perencanaan keuangan sebagai variabel independen dan juga subjek penelitian yang berbeda yaitu UMKM yang berada di Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis. Berdasarkan uraian dalam mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaku UMKM yaitu salah satunya ada pada literasi keuangan dan untuk UMKM di Ciamis yaitu pada perencanaan keuangan yang memiliki pengaruh pada kinerja usaha. Setelah penulis mencari beberapa penelitian terdahulu mengenai penelitian tersebut, di Ciamis sendiri penelitian mengenai UMKM masih jarang dilakukan. Oleh sebab itu, peneliti tertarik melakukan penelitian ini untuk mengetahui akan ada atau tidaknya pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM dan pengaruh perencanaan keuangan terhadap kinerja UMKM di Ciamis tepatnya di Kecamatan Cipaku. Alasan peneliti memilih di Kecamatan Cipaku untuk dijadikan lokasi penelitian karena UMKM di kecamatan tersebut menurut Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan merupakan UMKM yang unggul dalam usahanya dan juga dekat dengan kota yang daerahnya strategis dan dekat dengan jalan antar provinsi maka banyak para pelaku usaha yang memiliki potensi besar untuk memulai sebuah usaha dikarenakan banyak konsumen yang telah membeli produk mereka meskipun usaha yang dijalankan tergolong *newcomer*, dan juga penulis melakukan penelitian di kecamatan cipaku karena belum ada yang sama melakukan penelitian tentang pengaruh literasi keuangan dan perencanaan keuangan terhadap kinerja usaha dalam pemahamannya akan pengetahuan pengelolaan keuangan pada pelaku usaha.

Pemahaman, pengetahuan, pemanfaatan tentang literasi keuangan dan perencanaan keuangan diharapkan dapat membawa hubungan positif bagi kinerja usaha. Penelitian ini akan memberikan suatu informasi baru apakah pemahaman, pengetahuan, pemanfaatan tentang literasi keuangan dan perencanaan keuangan memiliki peran dalam peningkatan kinerja pada UMKM. Penelitian ini bisa membantu para pengelola atau pemilik UMKM dalam prosesnya mengambil keputusan dari segi pemahaman, pengetahuan, pemanfaatan tentang literasi keuangan dan perencanaan keuangan untuk mendapatkan kinerja usaha yang optimal.

Isna Nuraina Mutmainah, 2019

PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA UMKM (USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH)

Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Berdasarkan latarbelakang masalah yang dibahas di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **“Pengaruh Literasi Keuangan dan Perencanaan Keuangan Terhadap Kinerja UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dirumuskan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ?
2. Apakah perencanaan keuangan memiliki pengaruh terhadap kinerja UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian pada UMKM di Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis adalah untuk menguji secara empiris mengenai:

1. Pengaruh literasi keuangan terhadap kinerja UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).
2. Pengaruh perencanaan keuangan terhadap kinerja UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang keuangan yang berkaitan tentang Literasi Keuangan dan Perencanaan Keuangan terhadap Kinerja UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah

Dapat menjadikan riset ini sebagai sumber informasi dalam mengambil kebijakan terkait dengan manajemen UMKM dan menemukan solusi yang baik serta

menghasilkan ruang penelitian yang lebih luas dan terarah dalam upaya pengembangan dan peningkatan kualitas UMKM.

2. Bagi Pelaku UMKM

Dapat menjadi bahan masukan bagi pengusaha mikro kecil dan menengah dalam memperbaiki pemahaman tentang literasi keuangan dan perencanaan keuangan terhadap kinerja UMKM.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya dan diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca.